

DAFTAR ISI

Menimbang Birokrasi, Partai, dan Politik di Indonesia

1. Ekonomi-Politik Kebijakan Impor Garam Indonesia
Periode 2007-2012
Lukman Baihaki 1-16
2. Etnisitas sebagai Instrumen Politik dan Keamanan
di Kalimantan Barat Pasca Rezim Orde Baru
Jumadi, Mohammad Rizal Yakoop 17-34
3. Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia
Gonda Yumitro 35-50
4. Membongkar *Veto Player*
dalam Politik Kepartaian Indonesia Menuju Pemilu 2014
Arya Budi 51-66
5. Menimbang Media Sosial dalam *Marketing* Politik di Indonesia:
Belajar dari Jokowi-Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2012
Wisnu Prasetya Utomo 67-84
6. Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural:
Inspirasi dari Kota Yogyakarta
Erisandi Arditama 85-100

Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia

Gonda Yumitro •

Abstract

Some surveys showed that though Islamic parties had significant supports in 1999 and 2004 elections and their existences are in the largest Muslim population in the world, the current development indicates the decline supports of people on them. This paper will analyze various factors which cause such phenomena and predict the Islamic parties position on 2014 election. The result found that Islamic parties will face tough position on next election because of democracy, Indonesian Islamic characteristics and history, the competence of Islamic parties, and other external factors. The democracy causes a lot of problems, like the conflict among Islamic groups in Indonesia, which had dark history as the consequence of the politization of Islam by the elites. Moreover, the involvement of Islamic parties in Indonesian politics has not able to solve the real problems within the society, such as poverty, unemployment, corruption, etc. Unfortunately, the public opinion and education characters in Indonesia also don't support the Islamic political parties position.

Keywords:

Islam; parties; democracy; election; history.

Abstrak

Berbagai survei menunjukkan bahwa meskipun sempat mendapat suara yang signifikan pada pemilu 1999 dan 2004, dan berada di negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, perkembangan terkini menunjukkan penurunan dukungan masyarakat terhadap partai Islam. Tulisan ini akan menganalisis berbagai faktor yang menyebabkan penurunan dukungan tersebut dan memprediksi posisi partai Islam dalam pemilu 2014. Hasilnya ditemukan bahwa partai Islam mempunyai posisi yang sulit dalam pemilu 2014 karena faktor demokrasi, sejarah, kompetensi partai Islam, dan faktor eksternal. Demokrasi ternyata menyebabkan banyak persoalan, di antaranya adalah perpecahan di antara sesama kelompok Islam. Selain itu, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa Islam seringkali hanya dijadikan sebagai alat politik para elite. Apalagi keterlibatan partai Islam dalam politik Indonesia selama ini dinilai belum mampu menyelesaikan berbagai masalah riil yang terjadi di tengah masyarakat, seperti kemiskinan, pengangguran, korupsi, dan sejenisnya. Kondisi tersebut menjadi semakin rumit dengan opini publik dan karakter pendidikan di Indonesia yang kurang menguntungkan partai Islam.

Kata Kunci:

Islam; partai; demokrasi; pemilu; sejarah.

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Pada tahun

2014, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu keempat pasca reformasi. Menghadapi momentum penting ini, pada tanggal 1 s.d 8 Oktober 2012 yang lalu, Lingkaran Survey Indonesia (LSI)

- Dosen Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

mengadakan penelitian yang menunjukkan bahwa jika pemilu diadakan sekarang, maka semua partai Islam mendapatkan suara kurang dari 5 persen, dan jika semua suara mereka dikumpulkan, maka totalnya tidak lebih dari 21,1 persen. Bahkan tidak ada satu pun partai Islam yang bisa masuk menjadi lima besar pemenang pemilu (Republika, 22 Oktober 2012). Salah satu alasan kekalahan tersebut adalah terdapat lebih dari 46,1 persen responden yang menilai apabila menang dan memimpin, partai Islam akan menerapkan hukum syariah.

Senada dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan oleh *The Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC)* pada tanggal 5 dan 16 September 2012, menemukan bahwa PKS, PKB, dan PPP sebagai partai Islam hanya akan mendapatkan 3 persen suara, jika pemilu diadakan pada waktu itu. Partai Islam lain bahkan mendapatkan suara yang lebih kecil lagi. Berbeda dengan partai nasionalis seperti Golkar, Nasdem, dan Gerindra yang justru mendapat banyak suara dari pemilih muslim (www.thejakartapost.com).

Sekitar 230 juta atau sekitar 85 persen dari total penduduk Indonesia beragama Islam, jumlah yang lebih besar dari total penduduk Islam di kawasan Timur Tengah. Hasil penelitian ini menarik dikaji karena indikasi lemahnya partai Islam justru terjadi di tengah masyarakat yang mayoritas beragama Islam. Bahkan pandangan "negatif" terhadap partai Islam datang dari sebagian umat Islam sendiri.

Berdasarkan keadaan tersebut, maka muncul pertanyaan, mengapa posisi partai Islam lemah dan bagaimana prospek partai Islam dalam dinamika demokrasi di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, akan dijelaskan berbagai persoalan yang mempengaruhi masa depan politik Islam, di antaranya adalah masalah demokrasi dalam dinamika politik Indonesia dan sejarah Islam dalam politik Indonesia.

Pada bagian akhir, untuk membaca prospek mereka ke depan, akan dianalisis berbagai persoalan partai Islam seperti menurunnya dukungan publik dalam pemilu. Sebelumnya, akan dijelaskan konsep dasar demokrasi dan politik Islam terlebih dahulu.

Konsep Dasar Demokrasi dan Politik Islam

Sebagai ide, demokrasi bukan hal baru melainkan telah melalui proses panjang, bahkan dinilai sebagai salah satu bentuk pemerintahan. Menurut Aristoteles, demokrasi merupakan produk dari perubahan bentuk pemerintahan yang dimulai dari monarki, kemudian berubah menjadi tirani. Dari tirani berubah menjadi aristokrasi, kemudian oligarki. Oligarki digantikan oleh *polity*, yang kemudian menjadi demokrasi.

Dalam hal ini, Aristoteles percaya bahwa bentuk pemerintahan ideal adalah monarki, aristokrasi, dan *polity*. Sementara demokrasi, sama halnya dengan pemerintahan tirani dan oligarki, tidak lagi memperhatikan *equality* dalam partisipasi politik dan pengambilan kebijakan (Grigsby, 2011: 81). Singkatnya, demokrasi merupakan produk gagal dari tesis dan antitesis bentuk pemerintahan sebelumnya.

Secara istilah, demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratos* atau *kratein*. *Demos* artinya rakyat dan *kratos* berarti pemerintahan. Sehingga, secara sederhana demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sebagai implikasinya, diharapkan muncul *political equality*, *popular participation*, dan *rule in the public interest* (Sidney Verba, 1969: 3).

Pada awalnya, demokrasi langsung menjadi gambaran penentangan masyarakat terhadap sistem otoriter dalam pemerintahan, dengan menerapkan sistem *mass meeting*. Pemerintah yang otoriter biasanya berbentuk *monarchial absolutism*,

traditional dictatorship, military rule, dll. Namun dalam perkembangannya, seiring makin luasnya wilayah negara dan meningkatnya jumlah penduduk, demokrasi representatif menjadi pilihan sejak era *renaissance* Eropa. Meski dalam praktiknya, semangat dan nilai yang ada dalam demokrasi langsung tetap tidak bisa ditinggalkan, karena sifat kedua formula demokrasi tersebut yang saling melengkapi (David Altman, 2011: 40-41).

Dalam demokrasi perwakilan, pemilu menjadi elemen penting untuk melakukan proses perubahan pemerintahan. Pemilu menggambarkan peran penting dan strategis masyarakat dalam menentukan kehidupan mereka dalam sistem politik yang berjalan. Pada perkembangannya, demokrasi bergeser dan mempunyai beberapa varian, di antaranya adalah konsep *good governance, political democracy, industrial democracy, liberal democracy, participatory democracy*, dll. Dari beberapa varian tersebut, analisis tentang demokrasi sering mengerucut pada dua perdebatan penting, baik dalam konteks pemaknaan demokrasi prosedural maupun substansif. Yang pertama fokus pada aturan-aturan dalam demokrasi yang harus dilaksanakan secara konstitusional, sedangkan yang kedua lebih menekankan pada aspek produk dari demokrasi untuk kepentingan bersama (Shapiro, 1996:123).

Adapun partai Islam, berkaitan erat dengan pemahaman terhadap hubungan antara Islam dan politik. Bernhard Plattdasch (2009: xi), mendefinisikan bahwa politik Islam terdiri dari berbagai partai dan gerakan yang menginginkan penerapan syariat Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan makna yang sama, Olivier Roy menjelaskan bahwa partai dan gerakan Islam merupakan kelompok aktivis yang menjadikan Islam sebagai ideologi politik sebagaimana mereka memahami agama (1994: vii).

Sementara Anis Rasyid Baswedan menjelaskan bahwa politik Islam merupakan upaya untuk memperjuangkan aspirasi kelompok dan agenda-agenda Islam, agar mempengaruhi hukum dan kebijakan pemerintah, melalui proses elektoral dan institusi legislatif (2004: 670). Artinya, gerakan meng-Islamisasi masyarakat dalam tatanan demokrasi sangat erat kaitannya dengan partai Islam, melalui lembaga demokrasi yang tersedia.

Dinamika Demokrasi di Indonesia

Meskipun demokrasi dalam pandangan barat merupakan upaya untuk menghargai keberadaan manusia dalam hidup ini sehingga terwujud persamaan, realita menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang notabene mayoritas Islam “dipaksa” melaksanakan demokrasi ala Amerika, yang belum tentu sesuai dengan kondisi sosial politik negara-negara tersebut. Padahal demokrasi seharusnya bisa dimaknai seperti sepatu, boleh jadi berbeda antara yang satu dengan lainnya. Bangsa-bangsa Islam semestinya bisa diberi keleluasaan untuk mendefinisikan sendiri makna demokrasi yang sesuai dengan budaya politik yang mereka miliki.

Nyatanya, dominasi dan hegemoni barat terhadap negara berkembang, termasuk Indonesia, begitu kentara. Tidak ada persamaan, justru hukum rimba yang berlaku. Siapa yang paling kuat secara ekonomi, politik, dan militer, maka ia akan menguasai dunia. Kelompok realis percaya bahwa negara yang *powerful* akan mendikte negara yang lemah sesuai dengan kepentingan mereka.

Adapun Marxisme meyakini bahwa dalam konteks ekonomi, negara yang kuat akan mengeksploitasi negara yang lemah (Kivimaki, 2003: 17). Indonesia pun belum bisa mandiri di berbagai aspek kehidupan bernegara. Ia menjelma sebagai negara lemah yang banyak bergantung dengan

kekuasaan asing, terutama yang melabeli dirinya sebagai negara paling demokratis.

Di ranah domestik, Indonesia juga mengalami masalah serius. Kesejahteraan rakyat yang diinginkan atas nama demokrasi belum terwujud. Pilkada-pilkada yang awalnya dimaksudkan menjadi sarana distribusi kekuasaan, justru menjadi ajang menumpuk kekayaan dan kekuasaan pribadi. Hak otonomi daerah hanya memindahkan korupsi dari Jakarta ke berbagai daerah.

Belum lagi biaya yang dikeluarkan negara untuk menyubsidi kebutuhan daerah yang baru memekarkan diri dan belum mempunyai pemasukan unggulan, jumlahnya sangat besar. Bahkan program pemekaran wilayah seringkali digunakan untuk kepentingan segelintir *elite* di daerah (Aspinall & Mietzner, 2010: 8-9). Masih banyak contoh lain yang menggambarkan persoalan demokrasi di Indonesia.

Bahkan patut menjadi pertanyaan, di negara mana demokrasi benar-benar mampu menyejahterakan kehidupan masyarakat dan terhindar dari partai-partai pragmatis? Buktinya, Amerika yang menganggap diri sebagai negara paling demokratis justru memperlakukan negara lain dengan tidak elegan. Negara ini dengan mudah menyerang negara lain tanpa menghargai HAM dan kebebasan sebagaimana yang mereka dengungkan.

Akibatnya, kerugian dan korban berjatuh akibat demokrasi. Meskipun demikian, sebagian mereka yang sudah terbius dengan demokrasi menganggap persoalan-persoalan yang terjadi merupakan biaya transisi menuju demokrasi (Nagle & Mahr, 1999: 264-265). Dalam konteks Indonesia misalnya, beberapa hal yang terjadi sebagai konsekuensi dari demokratisasi antara lain:

Pertama, biaya proses demokrasi sangat mahal. Dalam pemilu 2009, berita *Kompas*, 3 Maret 2009 menyebutkan bahwa paling

tidak pemilu memerlukan 512.188 TPS dan 1.024.376 anggota satuan perlindungan masyarakat. Meski berbeda dengan data dari Menkopolkam yang menyampaikan bahwa dalam pemilu 2009 terdapat 611.636 TPS dan memerlukan 1.223.272 personil satlinmas, kedua data tersebut sama-sama mengindikasikan besarnya biaya operasional pelaksanaan pemilu di negeri ini.

Ketua KPU 2009, Abdul Hafidz, menyebutkan bahwa total anggaran KPU untuk melaksanakan pemilu tersebut berjumlah Rp 47,9 triliun. Dana tersebut digunakan pada tahun 2008 untuk kebutuhan KPU sebesar Rp 18,6 triliun dan pada proses pemilu 2009 dianggarkan menghabiskan dana Rp 29,3 triliun (www.anggaran.depkeu.go.id). Jauh membengkak dibandingkan pemilu 2004 yang hanya menghabiskan Rp 3,5 triliun untuk semua pemilihan DPR, DPRD I, DPRD II dan Pilpres. Padahal, jumlah tersebut belum termasuk dana yang dikeluarkan oleh partai dan individu calon anggota dewan atau kepala daerah, presiden, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemilu 2009 yang lalu tersiar kabar tentang bantuan asing sebesar US\$ 37,5 juta untuk mendukung calon yang dapat membuka dan mengamankan pintu agar pihak asing dapat masuk dalam proses globalisasi di Indonesia dengan mengangkat beberapa isu seperti HAM, demokrasi, persamaan gender, dan sejenisnya (<http://beritasore.com>).

Terlebih jika dihitung dengan dana pilkada yang berlangsung lebih dari 400 kali selama 5 tahun, dana pemilu tentu menjadi lebih besar. Terhitung 31 Desember 2004, Indonesia terdiri dari 33 Provinsi, 349 kabupaten, dan 91 kota/kota administrasi. Menurut data yang disampaikan oleh *Indonesian Public Institute*, dalam satu pilkada saja dana yang dikeluarkan untuk calon kepala daerah tingkat kabupaten bisa mencapai Rp 5 milyar, sedangkan untuk

tingkat provinsi bisa mencapai Rp 100 milyar (<http://banjarmasin.tribun-news.com>). Biaya yang besar tersebut pada akhirnya membuka peluang para elite untuk korupsi.

Kedua, proses demokrasi mengancam persatuan masyarakat, terlihat dari semakin terfragmentasinya masyarakat di negeri ini. Konflik begitu mudah disulut hanya karena persoalan sepele. Maklum, setiap lima tahun sekali, mereka seakan dilatih untuk berkonflik karena banyaknya jumlah pilkada yang diadakan. Jangankan dalam masyarakat, keluarga pun banyak yang berpisah karena perbedaan partai. Lebih berbahaya lagi ketika konflik ini tidak hanya di tataran pandangan politik, pada beberapa kasus bahkan telah menjadi kekerasan fisik.

Ketiga, demokrasi ternyata belum mampu benar-benar menjadi sarana perjuangan terhadap kepentingan masyarakat. Buktinya, banyak partai politik yang berkembang menjadi partai pragmatis, bahkan yang melekatkan identitas keagamaan sekalipun. Perjuangan mereka bukan lagi untuk kepentingan rakyat atau bangsa, tetapi lebih pada kepentingan golongan atau pribadi.

Suara rakyat hanya dibutuhkan pada saat pemilu saja, dilupakan setelah masa pemilu berakhir. Dalam mencari kader partai yang benar-benar militan memperjuangkan kepentingan rakyat, komitmen partai politik yang ada juga diragukan. Mereka bahkan terlihat memberikan kesempatan kepada politisi-politisi lompat pagar karena sistem pengkaderan internal partai yang kurang solid.

Indikasi pragmatisme partai politik terlihat pula dari pola koalisi berorientasi kekuasaan yang dibangun. Bagi mereka, ideologi atau komitmen terhadap moral politik terkadang bukan menjadi hal penting. Akibatnya, upaya memperjuangkan masyarakat yang kehilangan pekerjaan

dan diliputi oleh kemiskinan, terutama di kalangan petani dan buruh, tidak serius dilakukan. Masyarakat pun mulai kehilangan kepercayaan terhadap politik, terlihat dari besarnya arus golput terutama pada kalangan terdidik (Soebagio, 2008: 83-85).

Sejarah Islam dalam Politik Indonesia

Berkenaan dengan dinamika demokrasi sebagaimana dijelaskan di atas, perlu kiranya mengetahui perjalanan panjang posisi Islam. Menurut sejarah kemerdekaan Indonesia, Islam merupakan faktor yang sangat strategis dan berperan penting. Mengusung semangat jihad dan penolakan Islam terhadap segala bentuk penjajahan, para ulama di berbagai daerah memobilisasi massa untuk mengusir penjajahan sehingga Indonesia memperoleh kemerdekaan.

Hanya saja, seringkali Islam digunakan sebagai alat politik atau manipulasi terhadap masyarakat dan bukan murni untuk perjuangan Islam itu sendiri (Eliraz, 2004 :91). Pada setiap penggalangan massa para tokoh-tokoh agama akan didekati, atau istilah-istilah agama akan keluar dari mulut para pencari kekuasaan. Ketika dukungan umat Islam berdatangan dan pemerintahan kembali pada posisi stabil atau pemerintahan sudah mulai terbentuk, maka Islam dimarginalkan. Tidak sekadar disingkirkan, bahkan pemerintah seakan memberikan dukungan untuk munculnya *Islamophobia* di tengah masyarakat. Beberapa gerakan Islam dan tokoh-tokoh yang selama ini dikenal “sholeh” ditangkapi, menggunakan perangkat seperti “polisi antiteror”.

Islam yang pada awalnya diberikan ruang dalam politik Indonesia pelan-pelan disingkirkan. Awalnya, pasal pertama Pancasila mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya, kemudian bagian tersebut dihapus atas dasar persatuan bangsa.

Soekarno berjanji akan tetap memperhatikan kepentingan umat Islam dengan mendirikan kampus-kampus Islam, waktu itu IAIN dan sekarang menjadi UIN. Meskipun dalam perkembangannya ternyata kampus-kampus Islam tersebut tidak signifikan dalam menghasilkan ulama.

Perbedaan pemahaman di kalangan umat Islam dalam memandang politik pun berkembang luas. Meskipun mempunyai pandangan yang sama tentang arti penting dakwah dalam upaya menyebarkan ajaran Islam dan meningkatkan pemahaman ke-Islaman di tengah masyarakat, Islam ternyata berdebat tentang hubungan Islam dengan negara. Satu kelompok menginginkan Islam bersatu dengan negara dalam arti ditegakkannya syariat Islam. Namun, pihak lain mengatakan bahwa antara Islam dan negara harus dipisahkan, tidak sepatutnya negara membiayai atau mendukung berbagai kegiatan ke-Islaman (An-Na'im, 2008: 228).

Kelompok pertama sering disebut sebagai kelompok muslim nasionalis. Mereka memiliki komitmen yang kuat terhadap keyakinannya dan sangat menginginkan Islam sebagai dasar negara. Menurut mereka, Islam tidak membedakan urusan dunia dan akhirat, sama halnya urusan agama dan politik. Kesemuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Adapun kelompok yang terkenal sebagai sekuler nasionalis tidak menginginkan agama bersatu dengan negara. Mereka adalah para pemimpin politik yang tidak hanya berasal dari Islam, tetapi juga berasal dari agama lain seperti Katolik, Protestan, Hindu, dan agama lainnya. Menurut mereka, tidak sepatutnya politik dicampuradukkan dengan agama karena agama lebih kepada persoalan pribadi. Bentuk sekularisme yang mereka kembangkan sesungguhnya juga belum

pasti mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak berkenaan dengan politik. Dalam hal pakaian, makanan, atau kebiasaan tidak menutup kemungkinan bahwa mereka sangat memegang teguh prinsip agama.

Kian hari perpecahan umat Islam pada masa Orde Lama kian kentara. Pada waktu itu kelompok Islam terbagi dalam tiga kekuatan politik yaitu Masyumi, NU, dan DI/TII. Masing-masing gerakan politik ini berbeda karakter, Masyumi lebih kritis, sementara NU cenderung bersikap kooperatif dengan pemerintah dan justru mendukung ide NASAKOM yang dikembangkan Soekarno (Azra, 2006: 204). Menurut mereka, kaedah fikih bahwa apabila tidak bisa mendapat semuanya maka memperoleh sedikit sudah mencukupi, berlaku dalam keadaan ini. Atau dalam pepatah tak ada rotan, akar pun jadi.

Adapun DI/TII terkenal sebagai gerakan ekstremis yang berusaha untuk mendirikan negara sendiri, terpisah dari NKRI yang berdasarkan syariat Islam (Kimura, 2013: 42). Kondisi ini membuat pemerintah menganggap Islam sebagai ancaman sehingga Soekarno membubarkan Masyumi. Namun di sisi lain, pemerintah menjadi semakin dekat dengan komunisme (Hasyim, 2010: 189).

Belum lagi persoalan berkaitan dengan pemahaman ke-Islaman masyarakat muslim Indonesia yang masih sangat lemah. Mereka memahami agama lebih sebagai simbol ideologis dibandingkan alat dan panduan implementatif. Ketika simbol-simbol agama dipersoalkan akan menyebabkan kemarahan besar, namun saat isi ajarannya diremehkan umat Islam justru turut ambil bagian.

Contohnya adalah konflik Tanjung Priok saat kemarahan masyarakat disebabkan oleh seorang tentara masuk ke masjid tanpa melepas sepatu, kartun nabi

yang dibuat di Denmark, atau masalah film fitnah di Belanda. Konflik tersebut menyulut kemarahan masyarakat muslim di berbagai belahan dunia, sebagai bukti kecintaan mereka kepada Nabi dan Islam.

Namun mengenai banyak orang tidak melaksanakan sholat maupun kemaksiatan yang merajalela, jarang ada yang berani atau sekadar menunjukkan penentangannya sebagai bukti kecintaan terhadap Islam. Bahkan ia sendiri terkadang berada di barisan penghancur Islam. Lebih lanjut, masyarakat Islam begitu mudah dimobilisasi atas nama agama. Konflik Maluku atau Poso, semula hanya merupakan konflik pemuda tanpa sangkut paut agama, berubah menjadi perang antar agama yang menakutkan (Lloyd & Smith, 2001: 247).

Setelah Orde Lama jatuh dan digantikan Orde Baru, posisi Islam kembali diperhatikan. Pemerintah Orde Baru memerlukan dukungan umat Islam dalam upaya melawan komunisme. Muhammadiyah pada waktu itu mendirikan Komando Keamanan Muhammadiyah (KOKAM) dan NU membentuk Barisan Serba Guna (Banser). Hal ini dapat dimaklumi karena Soeharto sangat menaruh perhatian terhadap legitimasi politik di masa kekuasaannya, salah satunya menggunakan media Islam dan para tokohnya (Tickamyer & Kusujiarti, 2012: 43-44).

Kemudian setelah posisi Orde Baru semakin kuat, kondisi yang terjadi pada masa Orde Lama terulang kembali. Orde baru memberikan kekuatan politik dan ekonomi yang lebih baik kepada kelompok Kristen, China, dan militer.

Kelompok China lebih kuat secara ekonomi dan CSIS yang didirikan oleh Ali Murtopo makin berkembang. Soeharto pun mulai menggunakan pola pembangunan ekonomi sebagai alat penguat legitimasinya. Pada saat yang sama, kelompok Islam yang

berjasa bebas bagi Soeharto dalam menghancurkan kekuatan PKI menjadi termarginalkan (Hua, 2009: 198).

Meskipun demikian, posisi umat Islam ternyata masih cukup kuat, Soeharto memberi kesempatan kelompok Islam untuk bersatu dengan mendirikan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 1975. Namun, hal tersebut hanyalah strategi untuk memunculkan kesan perhatiannya pemerintah terhadap umat Islam.

Perpecahan yang terlanjur terjadi tetap semakin memanas. Nurcholis Madjid bahkan mengeluarkan pernyataan yang menjadi perdebatan berkepanjangan, yaitu *yes to Islam, no to Islamic party* (Assyaukanie, 2009 :55). Para aktivis mahasiswa juga terpengaruh dengan perdebatan itu seperti HMI yang kemudian terpecah menjadi dua yaitu HMI Dipo dan HMI MPO.

Menyikapi suasana yang tidak sehat tersebut, para ilmuwan dan intelektual muslim mencari solusi. Mereka mendirikan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Malang, pada 8 Desember 1990. Mereka ingin mengesankan Islam dalam bentuk yang lebih eksis, terprogram, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Lebih utama bahwa Islam mendorong pengembangan ilmu pengetahuan.

Rencana ini berjalan semakin lancar dengan keterlibatan B.J Habibie yang merupakan seorang menteri populer pada waktu itu, sekaligus vokal menyuarakan kerjasama antara pemerintah dengan kelompok Islam (Salim & Azra, 2003: 155).

Dalam perkembangannya, organisasi ini banyak dipengaruhi oleh sikap anggota yang tidak kooperatif terhadap pemerintah. Pada tahun 1993 misalnya, Amien Rais melakukan gerakan mengkritik pemerintah secara massif. Menurutnya, Indonesia mengalami persoalan serius berkenaan dengan sistem pemerintahan, KKN yang merajalela, dan kebijakan yang jarang berpihak kepada rakyat.

Dalam sistem pemerintahan, menurut Amien Rais, sistem pemerintahan terpusat harus digantikan dengan federalisme karena hanya menguntungkan pusat. Perasaan tidak adil dari daerah-daerah menimbulkan gejolak. Begitupun dengan KKN, banyak kroni Soeharto yang menjadi pejabat melakukan korupsi. Hal ini tentu membahayakan negara, apalagi pembangunan ditopang dari hutang. Perhatian pemerintah lebih kepada persoalan makro dan melupakan masalah keadilan ekonomi, dalam arti pemerataan pembangunan.

Amien Rais mengenalkan konsep tauhid sosial, dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Menurutnya, Islam tak hanya dipahami dalam artian normatif tetapi harus operasional, tidak hanya sekadar pribadi tetapi juga untuk masyarakat. Meskipun seseorang telah dapat dibilang soleh tetapi merasa aman dari kemungkaran yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, maka akibat dari kejahatan di sekitarnya akan tetap ia rasakan. Oleh karena itu, perlu adanya transformasi intelektual secara masif di tengah masyarakat untuk mewujudkan rasa keadilan (Saleh, 2001: 188).

Penurunan Dukungan dan Masa Depan Partai Islam Indonesia

Meski sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam dan keberadaan Islam sudah mengalami sejarah panjang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik sebelum kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan, namun dalam hal politik Islam rupanya seringkali disingkirkan. Sebelum kemerdekaan, ada banyak kerajaan Islam seperti Perlak, Samudra Pasai, Demak, Mataram, Banten, Cirebon, Goa Tallo, Ternate Tidore, Banjar, dll., tetapi setelah kemerdekaan, hampir semua kebijakan pemerintah tidak berpihak kepada Islam. Bahkan pada Orde Baru, Kikue Hamayotsu menjelaskan bahwa

karakter politik Indonesia adalah politik "*anti-Islamic*" dan lebih dekat dengan barat (Hamayotsu, 2002: 369).

Pada awal masa reformasi 1998, perkembangan partai Islam meningkat pesat. Jika sebelumnya kekuatan hanya ada di PPP, ICMI, serta dua organisasi Islam yaitu NU dan Muhammadiyah, maka sejak reformasi muncullah beberapa partai Islam baru seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dll. Beberapa gerakan dan kelompok Islam pun lahir dan berkembang pesat seperti Hidayatullah, Hizbuttahrir, Salafi, Laskar Pembela Islam (LPI), Laskar Jihad, Laskar Mujahidin Indonesia, dll (Hasan, 2006: 13).

Kondisi ini sesuai dengan pendapat Vali Nasr yang menyatakan bahwa penarikan militer dari politik Indonesia, merupakan kesempatan besar bagi kelompok Islam untuk melakukan manuver dalam politik (Nasr, 2005). Momentum reformasi adalah kesempatan kaum muslim untuk mengekspresikan ideologi yang lama mereka pendam seperti Wahabism, Ikhwanul Muslimin, Jamaat Movement, Iranian Revolution, dll.

Pun demikian dalam perolehan suara pemilu tahun 1999 dan 2004, partai-partai Islam masih mendapatkan posisi penting di hati rakyat. Namun pada 2009, turun secara signifikan. Jika pada tahun 2004, partai Islam bisa mendapatkan suara sebesar 38,1 persen misalnya, maka pada 2009, terjun bebas menjadi 27,8 persen saja (Mietzner, 2009: 12). Dukungan tersebut lebih rendah dari yang mereka dapatkan pada puncak kemenangan partai Islam tahun 1999.

Pada tahun 1999, PPP mendapatkan 11 persen suara, tetapi pada tahun 2004 dan 2009 secara berturut-turut suaranya menyusut menjadi 8 persen dan 5 persen. Nasib serupa dihadapi PKB yang hasil pemilu merosot dari 13 persen pada tahun

1999, menjadi hanya 11 persen pada tahun 2004, dan 5 persen pada pemilu 2009. Demikian juga dengan PAN yang mendapatkan 7 persen suara pada tahun 1999, turun menjadi 6,4 persen pada tahun 2004, dan tinggal 6 persen pada tahun 2009. Hanya PKS yang sedikit menunjukkan peningkatan dari 1,4 persen pada tahun 1999 dan 7,3 persen suara pada tahun 2004 menjadi 15 persen pada tahun 2009. Namun partai ini harus berjuang keras menghadapi pemilu 2014 untuk mempertahankan suaranya, mengingat kasus korupsi yang dihadapi beberapa kadernya, termasuk mantan ketua umum (<http://www.thejakartapost.com>).

Penurunan suara partai Islam ini justru diikuti dengan tingginya dukungan rakyat terhadap partai-partai nasionalis dan sekuler,

seperti Golkar, PDIP, dan Demokrat. Golkar mendapatkan posisi bertahan 22 persen suara pada tahun 1999 dan 2004, PDIP memperoleh 34 persen pada pemilu 1999 dan 19 persen pada pemilu 2004. Stagnansi suara pada pemilu 2004 diperkirakan karena munculnya partai Demokrat yang pada waktu itu mendapatkan 7 persen suara. Namun demikian, pada pemilu 2009, suara Demokrat melonjak menjadi 21 persen, dan membuat suara Golkar dan PDIP turun menjadi 14,4 persen dan 14 persen (Fealy, 2009).

Data di atas menunjukkan bahwa meskipun jumlah pemilih muslim di Indonesia hampir mencapai 90 persen, kekuatan politik Islam semakin melemah. Penurunan dukungan terhadap partai-partai Islam tersebut dapat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.
The Voice of Islamic Political Parties in Indonesia Since 1970

<i>Year</i>	<i>Number of Islamic political parties</i>	<i>Percent of votes won by Islamic parties</i>	<i>Percent of seats won by Islamic parties</i>
1971	5	27.2	26.1
1977	1	29.3	27.5
1982	1	25.5	25.8
1987	1	16.0	15.3
1992	1	14.9	15.5
1997	1	22.7	20.9
1999	6	39.2	33.6
2004	7	38.4	42.4
2009	9	29.2	29.6

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa partai Islam mulai mengindikasikan penurunan sejak tahun 2009, setelah mengalami kenaikan pada tahun 1999 dan 2004. Tidak mustahil dengan berbagai perkembangan yang ada, perkembangan partai Islam pada pemilu 2014 semakin menunjukkan penurunan.

Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan kemunduran partai Islam tersebut, baik internal maupun eksternal. Dalam aspek internal, beberapa hal yang

menghalangi partai Islam untuk menang dalam pemilu di Indonesia, di antaranya:

Pertama, berkaitan dengan karakter pemahaman Islam di Indonesia. Selama ini Islam lebih banyak dimaknai dalam artian ritual dibandingkan dengan pelibatan agama dalam semua dimensi kehidupan. Jika dihubungkan dengan pendapat Peter Mandavelle, maka penurunan dukungan terhadap partai Islam di Indonesia bisa dimaklumi. Dalam bukunya, ia berargumen bahwa meskipun di negara mayoritas

beragama Islam, tidak ada jaminan bahwa Islam akan relevan dalam kehidupan politik mereka. Lebih lanjut, ia menggambarkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan politik Islam, antara lain pemahaman teologi yang tekstual, atau kooptasi kekuasaan terhadap agama dan pengalaman sekuler dari kehidupan seseorang yang seringkali membuat jauhnya agama dari politik (Mandavelle, 2007: 2 & 14).

Douglas E. Ramage pun menjelaskan bahwa, sebagai bangsa yang multikultural, Indonesia telah mengambil pilihan yang tepat untuk menjadikan Pancasila sebagai jalan kompromi perdebatan antara kelompok Islamis dengan sekuler pada era awal kemerdekaan Indonesia (1995: 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia lebih menjadikan komitmen nasionalis, atas dasar Pancasila, sebagai pilihan politik mereka. Hanya sedikit saja yang menjadikan Islam sebagai komitmen politik.

Kedua, kemunduran dukungan terhadap partai Islam disebabkan perpecahan yang terjadi di antara umat Islam sendiri. Clifford Geertz menggambarkan perpecahan ini dengan membagi kelompok Islam Indonesia menjadi kelompok abangan, priyayi, dan santri (Suryadinata, 2002: 6). Bahkan dalam artian politik, Zachary Abusa mengklasifikasikan gerakan Islam di Indonesia menjadi beberapa jenis, seperti gerakan khalifah, pendirian negara Islam, dan kelompok pluralis demokrasi (2007: 10). Secara sederhana kelompok tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kelompok pendukung dan penentang demokrasi.

Kelompok yang mendukung demokrasi adalah mereka yang tergabung dalam partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PBB, PBR, PAN dan PKB. Sementara kelompok yang menentang demokrasi meliputi Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Salafi, dan Hizbuttahrir (Kunkler & Stepan, 2013: 122-

123). Karena perbedaan pola gerakan antara yang mendukung dan menolak demokrasi, maka seperti dapat dilihat di lapangan, antara satu kelompok dengan lainnya pun belum maksimal dalam menyinergikan gerakan dakwah mereka. Tak jarang, di antara sesama mereka membongkar aib dan kelemahan kelompok yang lain.

Oleh karena itu, wajar ketika muncul pendapat yang mengatakan bahwa demokrasi membuat umat Islam terpecah belah. Bahkan di antara sesama kelompok pendukung demokrasi sendiri terjadi perbedaan pendapat, perihal masyarakat Islam di Indonesia cenderung memilih partai berdasarkan kedekatan kultural. Kelompok Nahdhiyin memilih partai yang berlatar belakang NU, begitu juga dari kelompok Muhammadiyah cenderung kepada PAN. Kelompok Islam abangan bahkan lebih memilih partai-partai nasionalis dibandingkan partai Islam (Denny J.A., 2006: 219).

Ketiga, ketidakmampuan partai-partai Islam untuk menyelesaikan persoalan riil yang terjadi di tengah masyarakat, seperti isu kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain. Walaupun partai-partai sekuler kondisinya hampir sama tetapi mereka mampu menampilkan diri dengan lebih menarik. Dalam konteks ini, partai Islam di Indonesia belum mampu menyaingi partai-partai sekuler dalam hal menjual *platform* partai (Nasr, 2005:17). Padahal masyarakat sekarang sudah banyak yang berfikir rasional pragmatis, dengan hanya memilih partai yang dinilai akan mampu memperjuangkan kepentingannya saja.

Di sisi lain, Burhanuddin Muhtadi menjelaskan bahwa partai-partai sekuler mempunyai kemampuan unggul untuk merangkul para pemilih dari kelompok Islam (Halim, 2013). Di antaranya, partai-partai tersebut mulai membuat berbagai wadah keagamaan yang memungkinkan

kelompok Islam untuk mengekspresikan kepentingan mereka.

Aspek publikasi program partai sekuler pun berjalan mulus. Hal ini dikarenakan mereka mampu menampilkan berbagai program yang dinilai lebih *feasible* dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih lagi, menurut hasil survey LSI masyarakat tidak lagi menjadikan agama sebagai landasan mereka dalam menentukan pilihan, melainkan atas pilihan rasional demi kepentingan mereka, terutama dalam aspek ekonomi dan kesejahteraan (Tanuwijaya, 2010: 34-35). Hal ini membuat partai-partai Islam semakin kalah bersaing dibandingkan dengan partai sekuler.

Selain itu, berbagai faktor eksternal juga memberikan peran dalam penurunan dukungan terhadap partai Islam, di antaranya adalah: **Pertama**, opini publik yang dibangun oleh media massa ternyata kurang menguntungkan partai Islam. Berbagai opini tersebut membuat gerakan Islam mendapatkan *image* tidak begitu baik di tengah masyarakat. Berbagai kelompok Islam identik dengan tindak kekerasan, terorisme, dan ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri di tengah perkembangan zaman. Contohnya seperti isu GAM yang dinilai menjadi masalah berkepanjangan di tanah Aceh karena keinginan mereka untuk menerapkan syariat Islam.

Demikian juga dengan berbagai tindakan brutal dan cenderung melakukan kekerasan yang dilakukan oleh Front Pembala Islam (FPI), Laskar Jihad (LK), dan Jama'ah Islamia. Meskipun gerakan-gerakan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan partai Islam, tetapi posisi mereka bisa mempengaruhi penilaian masyarakat pada umumnya dalam mempersepsikan Islam (Lee, 2004: 103-104). Kondisi ini diperburuk dengan isu terorisme yang banyak dialamatkan kepada aktivis-aktivis Islam sehingga mempersulit posisi

Islam dalam politik, termasuk pandangan terhadap partai Islam.

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh LSI, terdapat indikasi bahwa politik Islam mengarah pada konservatisme dan kekerasan dalam politik. Hal ini dinilai akan menciderai semangat pluralisme di tengah masyarakat. Apalagi, tidak sedikit dari kelompok Islam tersebut yang menolak proses politik demokrasi dengan media partai. Pada akhirnya, hal ini pun memperlemah dukungan terhadap partai Islam. Sementara itu, partai-partai sekuler dengan sigap mencoba mengambil hati pemilih muslim, seperti berkoalisi dengan partai-partai Islam (Mustarom & V. Arianti, 2009: 1-2).

Kasus tersebut dialami oleh PKS. Dari opini publik yang berkembang, masyarakat curiga bahwa PKS memiliki agenda untuk mendorong penerapan syariat Islam di Indonesia yang heterogen (Steele, 2006). Berbagai pendapat senada lainnya menyebabkan PKS mulai berusaha menjadi partai terbuka. Namun, selain khalayak tetap belum percaya, yang justru terjadi adalah membuat para simpatisan PKS yang selama ini memang mendukung ideologi Islam, mulai menilai sikap PKS tidak konsisten.

Kedua, sistem pendidikan dan sejarah politik Indonesia yang cenderung sekuler. Sejauh ini, pendidikan Indonesia tidak terlalu banyak memberikan perhatian dalam persoalan keagamaan. Indonesia sudah merasa mapan dengan Pancasila, yang dinilai mampu menyatukan semua golongan dan agama. Oleh karena itu, meskipun peran Islam terhadap kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia sangat besar, pendidikan tetap diarahkan kepada semangat nasionalisme dan kebersamaan semua golongan.

Catatan sejarah Indonesia lebih banyak menempatkan militer sebagai pahlawan dalam perebutan kekuasaan, bukan para

ulama yang selama ini telah mengobarkan semangat jihad di tengah masyarakat yang berasal dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Barat, Banten, Demak, Makasar, dan sebagainya. Akibatnya, sekian lama Indonesia dibayangi persoalan demokratisasi karena adanya dwifungsi ABRI yang begitu kental dalam dunia politik dan bisnis di Indonesia. Meskipun reformasi 1998 menjadi momentum perubahan peta dan warna politik Indonesia, kenaikan sesaat dukungan partai Islam pun tidak bertahan lama.

Namun demikian, terdapat hal menarik di tengah menurunnya dukungan publik terhadap partai Islam, budaya Islam justru semakin menyebar luas di tengah masyarakat. Jika sebelumnya ucapan *assalamu'alaikum* masih merupakan hal yang tabu, di era ini menjadi ucapan salam yang sangat umum, bahkan disampaikan oleh orang-orang nonmuslim sekali pun. Demikian juga dengan budaya keberagaman yang lain, seperti budaya belajar Al-Quran, pakaian-pakaian Islami baik laki-laki maupun wanita, penerapan sistem bank syariah dan sejenisnya, terus meningkat dari waktu ke waktu.

Realita ini dapat merupakan indikasi masyarakat Indonesia memahami Islam dalam konteks kebudayaan dan keselarasan nilai Islam dengan kehidupan harian mereka, bukan pada simbol dan formalitas. Apalagi ketika sebagian kelompok menggunakan Islam hanya untuk kepentingan kelompok dan golongan, masyarakat Indonesia sudah mulai bisa menilai secara objektif. Mereka akan meninggalkan partai Islam yang korup, tidak pandai mengambil hati rakyat, dan mempunyai pola pengkaderan yang tidak kuat.

Bagi rakyat, yang dibutuhkan adalah partai yang mampu memperjuangkan aspirasi mereka, membantu rakyat menghadapi berbagai persoalan keseharian

mereka. Bukan partai yang salah urus, mendukung korupsi, terlibat berbagai konflik internal, miskin misi dan visi, tidak punya sistem pengkaderan yang baik, serta kepemimpinan yang tidak berwibawa.

Karenanya, partai-partai Islam harus benar-benar memahami budaya politik yang ada di tengah masyarakat Indonesia dan meningkatkan pelayanan mereka terhadap rakyat. Tidak semua mendukung piagam Jakarta dengan penegakan syariat Islam bagi pemeluknya. Tak sedikit pula yang mendukung syariat Islam, tetapi tidak percaya dengan sistem demokrasi yang diterapkan oleh partai-partai Islam, sebagaimana pemahaman yang dimiliki oleh Hizbuttahrir. Apalagi dengan misi yang dibawa, partai-partai Islam tadi terlibat konflik berkepanjangan antarsesama mereka. Biasanya masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap partai-partai seperti ini.

Jika dilihat dengan perspektif yang lain, hal ini menunjukkan bahwa partai Islam tetap mempunyai peluang jika sungguh-sungguh mampu memberdayakan budaya Islam, yang sudah memasyarakat di kalangan rakyat. Apalagi sejarah kemerdekaan dan pembangunan Indonesia banyak dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai gerakan Islam. Muhammadiyah misalnya, mempunyai ribuan sekolah dan ratusan kampus, serta rumah sakit untuk membantu pemerintah menyelesaikan persoalan pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya yang terjadi di tengah masyarakat. Belum lagi gerakan NU, Hidayatullah, dan lain-lain yang juga banyak terlibat dalam bidang sosial dan pendidikan.

Maka berdasarkan tantangan kekinian dan potensi dari sejarah Islam di atas, masa depan partai Islam sangat ditentukan oleh kemampuan para tokoh Islam, terutama para politisi yang berjuang di partai-partai Islam untuk menampilkan nuansa partai yang benar-benar mencerminkan nilai Islam.

Partai-partai Islam perlu bersatu, berkomitmen menjadi partai bersih, dan berjuang untuk rakyat dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa. Bukan sekadar slogan, tetapi dibuktikan dengan aksi nyata. Jika hal ini bisa dilakukan, maka masa depan partai Islam bisa menjadi lebih cerah. Namun sebaliknya, mengatasnamakan Islam untuk kepentingan pribadi, kelompok dan hanya sesaat, hanya akan membuat masyarakat tambah benci dan menjauh dari partai Islam.

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa posisi partai Islam dan dinamika demokratisasi di Indonesia tidak mudah. Mereka dihadapkan pada berbagai realita yang tidak hanya menuntut wacana, melainkan aksi nyata. Rakyat sudah cerdas dan tidak mau lagi dibodohi dengan hal-hal yang berbau SARA dan kurang mendidik. Bagi mereka, yang diperlukan adalah bagaimana caranya agar nilai Islam benar-benar diimplementasikan dalam perpolitikan di Indonesia. Artinya, sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan Islam tidak menjadi kendala serius bagi partai Islam untuk melebarkan sayapnya, jika dinilai sebagai peluang.

Hanya saja, realita di lapangan yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa demokrasi telah memunculkan perbedaan pandangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagian umat Islam mendukung demokrasi dengan alasan kesesuaian nilai yang dimiliki dengan Islam, dan sejarah kemajuan bangsa barat yang terjadi melalui proses demokratisasi. Sementara sebagian kelompok Islam lainnya menilai bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam dan mahal secara finansial dan sosial, padahal tidak memberikan apa yang masyarakat butuhkan.

Umat Islam dan partai Islam pun terpecah. Sebagian partai Islam mulai

terjebak dengan indahnya kata demokrasi. Bahkan tidak sedikit dari partai Islam yang justru tidak lagi mampu menunjukkan identitas ke-Islamannya, karena budaya korupsi yang mulai menggerogoti barisan mereka. Sementara kelompok lain menutup diri dari perkembangan politik yang ada.

Akhirnya, partai Islam dalam dinamika politik Indonesia akan sangat ditentukan oleh komitmen awal mereka terhadap nilai ke-Islaman dan komitmen membangun bangsa. Jika ingin menyelesaikan kecenderungan suara partai Islam yang terus menurun, maka partai-partai Islam tadi harus benar-benar mampu menampilkan diri sebagai partai yang solutif, di tengah mulai muaknya masyarakat terhadap tingkah partai-partai korup. Partai Islam tidak hanya bisa berwacana, tapi harus mampu memberikan terobosan-terobosan baru dan memanfaatkan potensi kekuatan yang mereka miliki. Sungguh, sejarah Islam dalam membangun bangsa, akan mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat Indonesia jika benar-benar ditapak tilasi dengan sistem, manajemen dan komitmen moral yang kuat.

Daftar Pustaka

Buku

- Abusa, Zachary. (2007). *Political Islam and Violence in Indonesia*. New York: Roudledge.
- An-Na'im, Abdullahi Ahmad. (2008). *Islam and The Secular State, Negotiating The Future of Shari'ah*. USA: President and Fellow of Harvard College.
- Assyaukani, Luthfi. (2009). *Islam and The Secular State in Indonesia*. Singapore: ISEAS Publication.

- Azra, Azyumardi. (2006). *Indonesia, Islam, and Democracy: Dynamics in a Global Context*. Jakarta: Solstice Publishing.
- Beinin, Joel & Stork, Joe. (1997). *Political Islam: Essay From Middle East Report*. New York: IB. Tauris Publisher.
- Budiarjo, Miriam. (1999). *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cesari, Jocelyne. (2004). *When Islam and Democracy Meet: Muslims in Europe and in the United States*. New York: Palgrave Macmillan.
- Altman, David. (2011). *Direct Democracy Worldwide*. New York: Cambridge University Press.
- Diamond, Larry. (2003). *Developing Democracy toward Consolidation (terjemahan)*. Yogyakarta: IRE Press.
- Eliraz, Giora. (2004). *Islam in Indonesia, Modernism, Radicalism, and the Middle East Dimension*. UK: Sussex Academic Press.
- Feldman, Noah. (1970). *After Jihad: America and Struggle for Islamic Democracy*. New York: Farrar.
- Grigsby, Ellen. (2011). *Analyzing Politics: An Introduction to Political Science*. USA: RRD Crawfordville.
- Hasan, Noorhaidi, (2006). *Laskar Jihad, Islam, Militancy and The Quest for Identity, In Post New Order Indonesia*. Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program Publication.
- Hasyim, Rosnani. (2010). *Reclaiming The Conversation, Islamic Intellectual Tradition in The Malay Archipelago*. Selangor: Mutiara Majestic.
- Hua, Shiping. (2009). *Islam and Democratization in Asia*. New York: Cambria Press.
- J.A, Denny. (2006). *Melewati Perubahan: Sebuah Catatan Atas Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Kimura, Ehito. (2013). *Political Change and Territoriality in Indonesia, Provincial Proliferation*. New York: Routledge.
- Kivimaki, Timo. (2003). *US- Indonesian Hegemonic Bargaining, Strength of Weakness*. England: Ashgate Publishing Limited.
- Kunkler, Mirjam & Stepan, Alpred. (2013). *Democratization and Islam in Indonesia*. USA: Columbia University Press.
- Lloyd, Grayson & Smith, Shannon. (2001). *Indonesia Today: Challanges of History*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mandavelle, Peter. (2007). *Global Political Islam*. New York: Routledge.
- Mietzner, Marcus. (2009). *Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Singapore: ISEAS Publications.
- Nagle, John D & Mahr, Alison. (1999). *Democracy and Democratization*. London: SAGE Publications.
- Platzdasch, Bernhard. (2009). *Islamism in Indonesia: Politics in The Emerging Democracy*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Ramage, Douglas E. (1995). *Politics in Indonesia: Democracy, Islam, and the Ideology of Tolerance*. London: Routledge.
- Roy, Olivier. 1994. *The Failure of Political Islam*. Translated by Carol Volk. USA: President and Fellows of Harvard College.
- Saleh, Fauzan. (2001). *Modern Trend in Islamic Theological Discourse in 20th Century Indonesia: A Critical Study*. Leiden: Koninklijke Brill NV.

- Salim, Arskal & Azra, Ayzumardi. (2003). *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Shapiro, Ian. (1996). *Democracy's Place*. USA: Cornell University Press.
- Suryadinata, Leo. (2002). *Election and Politics in Indonesia*. Singapore: Institute of South East Asian Studies.
- Tickamyer, Ann R & Kusujiarti, Siti. (2012). *Power, Change and Gender Relations in Rural Java, A Tale of Two Villages*. USA: Ohio Univerity Research.
- Jurnal**
- Baswedan, Anies Rasyid. (2004). Political Islam in Indonesia, Present and Future Trajectory. *Asian Survey*. September/October, Vol.XLIV, No.5. ISSN 0004-4687, electronic ISSN 1533-838X. The regents of the University of California, 670.
- Hamayotsu, Kikue. (2002). Islam and Nation Building in Southeast Asia: Malaysia and Indonesia in Comparative Perspective. *Pacific Affairs*, Fall 2002, Vol. 75 No.3. Pa Pacific Affairs: University of British Columbia, 369.
- Mustarom, Tuty Raihana & V Arianti. (2009). *Declining Support for Islamic Parties: Exploring the Indonesia "Paradox"*. (Online). (<http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS0432009.pdf>).
- Lee, Jeff. (2004). The Failure of Political Islam in Indonesia. *Stanford Journal of East Asian Affairs*, Vol 4. No.1, Winter 2004. (Online). (<http://www.stanford.edu/group/sjeaa/journal41/seasia1.pdf>).
- Nasr, Vali. (2005). The Rise of Muslim Democracy. *Journal of Democracy Volume 16, Number 2 April 2005*.
- Sein, Laila. (22-23 April 2005). *Democracy and Development: Challenges for Islamic World*. CSID sixth Annual Conferences.
- Soebagio. (2008). Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi Indonesia. *Jurnal Makara, Sosial Humaniora Vol.12 No.2 Desember 2008*. Universitas Indonesia, Jakarta. (Online). (<http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/viewFile/171/167>).
- Tanuwijaya, Sunny. (2010). Political Islam and Islamic Parties in Indonesia: Critically Assessing the Evidence of Islam's Political Decline. *Contemporary South-east Asia Vol. 32 No. 1 April 2010*.
- Artikel dari Internet**
- Damanik, Caroline. (2009). *Penetapan Jumlah TPS Terkait DPT*. (Online). (<http://nasional.kompas.com/read/2009/03/03/12125823/Penetapan.Jumlah.TPS.Terkait.DPT>, diakses 18 September 2012 pukul 13.14 WIB).
- Fealy, Greg. (2009). *Indonesia's Islamic Parties in Decline*. (Online). (<http://inside.org.au/indonesia%E2%80%99s-Islamic-parties-in-decline/>, diakses 30 September 2012 pukul 14.00 WIB).
- Halim, Haeril. (2013). *Secular Parties to Benefit from Muslim Vote*. (Online). (<http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/18/secular-parties-benefit-muslim-vote.html>, diakses 18 Desember 2013).
- Steele, Andrew. (2006). *The Decline of Political Islam in Indonesia*. **Asia Times**. (Online). (http://www.atimes.com/atimes/Southeast_Asia/HC28Ae03.html, diakses 28 Maret 2006).
- Verba, Sidney. (1969). *Thoughts about Political Equality What Is It? Why Do We*

Want It?. (Online).
(www.hks.harvard.edu/inequality/Summer/Summer01/papers/Verba.pdf, diakses pada 3 Oktober 2012 pukul 10.05 WIB).

YPS. (2012). *Islamic Parties Lose Relevance.* (Online) (<http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/15/Islamic-parties-lose-relevance.html>, diakses 20 Oktober 2012 pukul 15.30 WIB).

<http://www.anggaran.depkeu.go.id/web-print-list.asp?ContentId=274>

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2013/07/19/besarnya-biaya-kampanye-pada-pilkada-picu-tindak-korupsi>

<http://beritasore.com/2009/06/29/lsm-hentikan-intervensi-asing-dalam-pilpres/>

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/12/10/22/mc9zkn-hatta-enggan-tanggapi-survei-parpol-islam>

<http://www.thejakartapost.com/news/2013/12/10/former-pks-boss-gets-16-years-graft.html>

PERSYARATAN NASKAH UNTUK JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (JSP)

1. Naskah yang ditulis untuk JSP meliputi hasil penelitian, baik penelitian lapangan maupun penelitian pustaka dan artikel refleksi analisis fenomena sosial politik.
2. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika naskah hasil penelitian adalah judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, pembahasan atau analisis, simpulan, serta daftar rujukan.
3. Naskah diketik dengan program Microsoft Word di atas kertas HVS Kuarto sekitar 5000-6000 kata dengan huruf Times New Roman ukuran 12 pts.
4. Naskah diserahkan langsung kepada redaksi atau juga dapat melalui attachment e-mail ke alamat: jspugm@gmail.com.
5. Judul artikel dalam Bahasa Indonesia tidak boleh lebih dari 14 kata, sedangkan judul dalam Bahasa Inggris tidak boleh lebih dari 12 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah dengan ukuran huruf 14 poin.
6. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal, dan ditempatkan di bawah judul artikel. Dalam hal naskah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan penulis utama atau penulis yang namanya tercantum dalam urutan pertama. Penulis utama harus mencantumkan alamat korespondensi atau e-mail.
7. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang masing-masing abstrak 75-100 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata. Abstrak minimal berisi tujuan, metode, dan hasil penelitian.
8. Tabel dan gambar harus diberi judul, berspasi tunggal, nomor dan sumber harus jelas. Jika terdapat foto atau gambar, sebaiknya dalam format hitam putih.
9. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi, buku, dan publikasi lainnya yang relevan). Artikel yang dimuat di JSP disarankan untuk digunakan sebagai rujukan.
10. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Laclau, 1989: 81).
11. Cek setiap rujukan artikel untuk akurasi dan pastikan setiap karya yang dikutip dalam artikel ditulis dalam Daftar Pustaka atau Rujukan. Karya-karya yang tidak dikutip, tetapi tercantum dalam Daftar Pustaka atau Rujukan akan dihilangkan oleh penyunting.
12. Daftar rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara alfabetis dan kronologis.

Buku:

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities*. London: Verso.

Buku kumpulan artikel:

Saukah, A. & Waseso, M.G. (Eds)/ 2002. *Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah* (Edisi ke-4, cetakan ke-1). Malang: UM Press

Artikel dalam buku kumpulan artikel:

Curran, J. (1991). Rethinking the Media as a Public Sphere 4.

Artikel dalam jurnal atau majalah:

Haryanto, Ignatius. (2008). Industri media membesar, bagus untuk bisnis, tapi untuk demokrasi?. *Jurnal Sosial Demokrasi*. Vol. 3 No. 1 Edisi Juli-September.

Artikel dalam Koran:

Pramono, Sidik. 12 Desember 2011. Menagih Hanji (De)sentralisasi. *Kompas*, hlm. 6.

Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang):

Kompas. 8 Desember, 2011. Pemilihan Pimpinan KPK: Antara Pakta Integritas dan Independensi, hlm. 3.

Dokumen resmi:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. *Pedoman Penulisan Laporan Penelitian*. Jakarta: Depdikbud. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. 1990. Jakarta: PT. Armas Duta Jaya.

Buku terjemahan:

Hennessy, Bernard. (1989). *Pendapat Umum*. Edisi keempat, terjemahan Amiruddin Nasution. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Makalah, Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:

Dhakidae, D. (1991). *The State, The Rise of Capital and the fall of Political Journalism: Political Economy of Indonesia News Industry*. Disertasi PhD tidak diterbitkan, Ithaca, New York: Cornell University.

Suwannathat-Pian, K. (2004, 5-7 Februari). *Question of Identity of the Muslims in Southern Thailand, A Comparative Examination of Responses of the Sam-Sams in Satun and of the Thai Malay Muslim in the Three Provinces of Yala, Narathiwat, and Pattani to Thailand's Quest for National Identity*. Paper presented at the A Plural Peninsula: Historical Interaction among the Thai, Malays, Chinese and Others, Nakhon Si Thammarat.

Internet (karya individual):

Clancy, Robert. (2011). *Ethics of Democracy*. (Online). (http://www.cooperativeindividualism.org/clancy-robert_ethics-of-democracy.html, diakses 14 Juni 2011).

Internet (artikel dalam jurnal online):

Kuncoro, Mudrajad. (2011). The Global Economic Crisis and Its Impact on Indonesia's Education. *Journal of Indonesian Economy and Business (Online)*, **Volume 26**, **No.1, 2011** (<http://jebi.feb.ugm.ac.id/>, diakses 29 Desember 2011).

Internet (bahan diskusi):

Wilson, D. 20 November 2005. Summary of Citing Internet Sites. *NETTRAIN Discussion List*. (Online), (NETRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu, diakses 22 November 1995)

13. Semua naskah ditelaah secara anonim oleh mitra bebestari (*reviewers*) yang ditunjuk oleh penyunting menurut bidang kepakarannya. Penulis diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan (revisi) naskah atas dasar rekomendasi/saran dari mitra bebestari atau penyunting. Kepastian pemuatan atau penolakan akan diberitahu melalui alamat *e-mail* Penulis.
14. Penyunting mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis, dan tata bahasa naskah yang dimuat.
15. Segala sesuatu yang menyangkut perizinan pengutipan atau penggunaan *software* komputer untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi tanggung jawab penuh penulis.
16. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan honorarium dan bukti pemuatan sebanyak 3 (tiga) eksemplar dan cetak lepas sebanyak 5 (lima) eksemplar. Artikel yang tidak dimuat *tidak akan dikembalikan*, kecuali atas permintaan penulis.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia

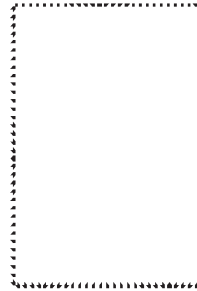
.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281